

MATRIK LKPJ 2023 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. BERAU

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERTANIAN	1.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	392.900.000	308.746.075	2	2	Dokumen		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.500.000	125.779.500	3	3	Dokumen		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	3.227.600	5	5	Dokumen		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	240.400.000	179.738.975	2	2	Dokumen		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.824.508.558	14.058.402.994	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.663.488.558	13.900.842.994	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.020.000	157.560.000	15	15	Orang/Bulan		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.000.000	163.272.008	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000	86.324.700	140	140	Orang		
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.000.000	56.947.400	12	9	Orang	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas atasan dan pada 3 bulan terakhir tahun 2023 tidak ada undangan yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	koordinasi dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan terkait jadwal materi selama 1 tahun sehingga dapat dilaksanakan
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	19.999.908	2	2	Orang		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.002.175.000	973.838.386	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.968.000	14.968.000	20	20	Jenis		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.924.000	651.536.909	15	15	Jenis		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.807.000	7.596.000	10	10	Tabung		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.476.000	57.223.000	15	15	Kali		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	8.950.000	20	20	Eksemplar Lembar	2500	1700
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	4.860.000	24	24	Koran					
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000	228.704.477	138	131	Kali			perjalanan menyesuaikan dengan surat perintah tugas berdasarkan surat undangan, dan kepentingan lain serta menyesuaikan dengan waktu dan keadaan	tidak ada permasalahan	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.960.000	38.938.000	2	2	Paket		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	40.960.000	38.938.000	2	2	Paket		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.644.000	868.990.130	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.498.000	1.070.000	100	100	Lembar		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.750.000	232.248.470	12	12	Bulan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.396.000	635.671.660	18	18	OB		
						20	20	Jenis	"didalam sub kegiatan ada 2 indikator yaitu Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran (OB) dan Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor (Jenis)	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.700.000	361.621.497	100%	100%	Persen		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	215.000.000	155.674.497	60	54	Unit	Didalam sub kegiatan terdapat rincian belanja bbm, belanja pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan. silpa terjadi dikarenakan belanja bbm dan belanja pajak dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan untuk belanja pemeliharaan kendaraan roda dua penyuluh sebagian menggunakan anggaran operasional di UPT. BPPP	tidak ada permasalahan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	7.590.000	15	15	Unit		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.700.000	198.357.000	1	1	Kantor		
			2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.235.216.300	3.928.860.114	265	215	Unit	"penjelasan ada di sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.235.216.300	3.928.860.114	265	215	Unit	Ada 2 Kelompok usulan aspirasi yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dibelanjakan sebanyak 50 unit Handsprayer	Sosialisasi ke pemberi anggaran aspirasi tentang ketentuan pemberian bantuan hibah barang
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5.782.722.520	4.755.330.020	1956	1569	Ha dan Ekor		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	3.009.078.000	2.500.920.782	975	589	Ekor	Peternak kambing banyak yang belum mengenal inseminasi buatan pada kambing	Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai teknologi inseminasi buatan pada kambing
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	748.699.520	664.984.015	31	33	Ton	*didalam sub kegiatan ada 2 indikator yaitu Tersedianya Benih Padi Unggul (ton) dan Perawatan Pohon Duku, Rambutan, Durian, Elai Duplikat (pohon)	
					168	168	Pohon			
			Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.024.945.000	1.589.425.223	981	980	Ha	untuk pengadaan umbi bawang merah tidak terealisasi dikarenakan tidak ada penyedia yang bersedia dikarenakan harga tidak mencukupi	perubahan standar harga
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	713.236.000	665.361.310	15	15	Peternak dan Kelompok	*didalam sub kegiatan ada 2 indikator yaitu Tersedianya HPT (Ha) dan Tersedianya Bibit Sapi Unggul (ekor). Permasalahan realisasi 3 ekor : Indukan sapi tidak produktif lagi	Penggantian indukan yang tidak produktif dengan sapi calon indukan/dara
			Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	613.236.000	569.408.192	3	3	Ha		
						5	3	Ekor		
			Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100.000.000	95.953.118	15	15	Kelompok		
			3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	530.242.000	120.263.424	1	1	Dokumen	Sumber Pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum dan Program FCPF. DAU dapat terlaksana dengan baik yaitu sesuai indikator dokumen LP2B, sedangkan program FCPF yang tidak dapat terlaksana maksimal yaitu Perjalanan Dinas Pembelajaran ke Sukabumi dan Yogyakarta. untuk Pembelajaran ke Sukabumi tidak terlaksana dikarenakan objek yang akan dikunjungi tidak sesuai, dan Pembelajaran ke Yogyakarta tidak terlaksana dikarenakan tim yang ada masih SK lama (blm ada SK baru).	Jika tahun 2024 dana tersedia lagi maka akan diupayakan untuk memilih lokasi sesuai seperti daerah Sukamandi (UPT Balai Benih Induk), dan untuk tim LP2B akan dibuatkan SK baru.
			Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	530.242.000	120.263.424	1	1	Dokumen		
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.641.073.000	950.905.487	5	3	Unit	*penjelasan ada di sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; dan sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	407.080.000	60.978.500	250	0	Ha	1. Regulasi tentang pencairan dana swakelola yang mengharuskan belanja barang dilakukan perangkat daerah pelaksana dan pekerjaan dilakukan oleh petani, yang semula diharapkan anggaran bisa dimasukkan semua ke rekening kelompok dan dikelola langsung oleh kelompok baik belanja barang sampai pembayaran upah sesuai RAB yang telah disetujui oleh perangkat daerah; 2. Kuantitas SDM perangkat daerah pelaksana masih sangat kurang; 3. Dikarenakan pelaksanaan swakelola yang dikerjakan oleh petani memerlukan penyesuaian jadwal tanam sehingga jika dilakukan pengadaan material oleh perangkat daerah melalui pihak ketiga dalam jumlah besar dikhawatirkan akan terjadi penumpukan material dilokasi di saat petani belum siap melaksanakannya, sebaliknya jika pengadaan dilakukan langsung oleh petani maka petani dapat mengatur kapan material harus didatangkan, sehingga material ataupun pekerjaan dapat efektif dan efisien	Paket pengadaan 2024 sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari perencanaan pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan pekerjaan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan.
			Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	215.230.000	194.525.459	1	1	Paket		
			Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	217.600.000	46.998.688	2	0	Unit	1. Regulasi tentang pencairan dana swakelola yang mengharuskan belanja barang dilakukan perangkat daerah pelaksana dan pekerjaan dilakukan oleh petani, yang semula diharapkan anggaran bisa dimasukkan semua ke rekening kelompok dan dikelola langsung oleh kelompok baik belanja barang sampai pembayaran upah sesuai RAB yang telah disetujui oleh perangkat daerah; 2. Kuantitas SDM perangkat daerah pelaksana masih sangat kurang; 3. Dikarenakan pelaksanaan swakelola yang dikerjakan oleh petani memerlukan penyesuaian jadwal tanam sehingga jika dilakukan pengadaan material oleh perangkat daerah melalui pihak ketiga dalam jumlah besar dikhawatirkan akan terjadi penumpukan material dilokasi di saat petani belum siap melaksanakannya, sebaliknya jika pengadaan dilakukan langsung oleh petani maka petani dapat mengatur kapan material harus didatangkan, sehingga material ataupun pekerjaan dapat efektif dan efisien	Paket pengadaan 2024 sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari perencanaan pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan pekerjaan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan.
			Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	801.163.000	648.402.840	3	3	Paket		
			4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
			Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.451.524.120	1.156.161.110	10.790	13923	Ekor		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonis	293.677.000	279.217.261	4.000	3896	Ekor HPR dan Ekor Ternak		
			Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah/Kota	1.157.847.120	876.943.849	6.790	10027	Ekor		
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	493.504.000	448.558.064	250	285	Sampel	"didalam kegiatan ada 2 indikator yaitu Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha (sampel) dan Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di UPT RPH (ekor)	
						1.302.200	1.192.702	Ekor		
			Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	312.548.000	269.288.095	1.302.200	1.192.702	Ekor	sub kegiatan merupakan anggaran operasional UPT. RPH. Realisasi tidak tercapai dikarenakan ketersediaan ternak potong dari dalam Kabupaten Berau berkurang sementara sebagian pelaku usaha pemotongan hewan ruminansia memenuhi kebutuhan ternak sapi potong masih mengandalkan ternak-ternak sapi dari dalam Kabupaten Berau. sedangkan pada ternak unggas karena ketersediaan ayam pedaging mengalami penurunan terutama di bulan Juni dan Juli 2023 sehingga jumlah pemotongan menurun.	permasalahan bersumber dari eksternal yang bukan tugas dan fungsi dari UPT. RPH, tetapi ini akan dijadikan laporan pada dinas terkait.
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	180.956.000	179.269.969	250	285	Sampel		
			5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	8.986.999.600	6.717.324.522	10	10	Kecamatan		
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8.986.999.600	6.717.324.522	48	43	Kali	Silpa terjadi karena selisih harga pembelian dengan standar di DPA untuk belanja pengadaan pupuk organik cair, dan silpa belanja ongkos kirim	tidak ada permasalahan
			6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	379.495.000	303.650.780	40	36	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	Silpa terjadi dikarenakan sebagian belanja jasa narasumber tidak direalisasikan karena yang seharusnya 2 orang hanya terealisasi 1 orang, dan belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan dan undangan. sedangkan untuk indikator "Jumlah Peternak yang Mendapat Fasilitas Modal Usaha" tergantung permohonan peternak. Minat peternak untuk usaha di bidang peternakan masih rendah, Resiko usaha di bidang peternakan relatif tinggi, Jangka waktu kredit di perbankan rata-rata 3-5 tahun baru lunas sehingga peternak baru mulai berusaha lagi apabila sudah lunas atau bahkan usahanya sudah berjalan tidak perlu lagi kredit dengan perbankan.	Meningkatkan pembinaan kepada kelompok tani / ternak dalam mengembangkan usahanya; Sosialisasi kepada kelompok tani / ternak terkait pembiayaan untuk meningkatkan usahanya
			Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	259.495.000	192.455.113	20	20	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	120.000.000	111.195.667	20	16	Orang	sda	sda
			7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.743.080.000	1.506.583.550	10	10	Kecamatan		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	319.920.000	307.117.974	10	10	BPP		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	830.000.000	712.853.334	66	66	Kelompok		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	593.160.000	486.612.242	22%	22%	Persen		
			JUMLAH	44.798.980.098	37.326.807.471					

Tanjung Redeb, 28 Februari 2024

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

